

**PELAKSANAAN PROGRAM TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
BIDANG KESEHATAN DI KELURAHAN JAWA
KOTA SAMARINDA**

Ayun Sundari dan Santi Rande

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 4, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Pelaksanaan Program Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bidang Kesehatan di Kelurahan Jawa Kota Samarinda

Pengarang : Ayun Sundari

NIM : 1702015085

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 8 Oktober 2024

Pembimbing,



Dr. Santi Rande, M. Si
NIP. 19751001200042001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	
Volume : 12	
Nomor : 4	
Tahun : 2024	
Halaman : 1107-1116	
Koordinator Program Studi Administrasi Publik Dr. Fajar Apriani, M.Si NIP. 19830414 200501 2 003	

PELAKSANAAN PROGRAM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) BIDANG KESEHATAN DI KELURAHAN JAWA KOTA SAMARINDA

Ayun Sundari ¹, Santi Rande ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bidang kesehatan di Kelurahan Jawa Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program imunisasi anak dan balita, Program Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Keluarga Berencana (KB), serta sosialisasi pencegahan stunting. Informan kunci meliputi ketua tim penggerak PKK, sedangkan yang menjadi informan adalah anggota tim penggerak PKK Kelurahan Jawa, Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan 4 langkah yaitu pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tim penggerak PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, telah berjalan dengan baik. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain imunisasi anak balita yang melibatkan penyuluhan imunisasi untuk anak usia 0-12 bulan, termasuk hepatitis B, BCG, dan polio. Program PHBS juga aktif dilakukan, dengan mengajak masyarakat mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, mengonsumsi makanan sehat, dan berolahraga. Selain itu, program KB telah membantu masyarakat dalam memilih alat kontrasepsi sesuai kesepakatan keluarga. Sosialisasi pencegahan stunting bahkan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi, imunisasi, dan pemantauan gizi secara berkala. Faktor penghambat utama adalah dari internal sendiri yaitu minimnya antusiasme dari pengurus yang terlihat dari kurangnya rasa disiplin dalam menjalankan program kesehatan yang telah dirancang serta masih belum meratanya pemahaman mengenai kesehatan.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Program, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Tim Penggerak PKK*

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas suatu masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong, meningkatkan kesadaran akan

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ayunsundari9898@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

potensi yang dimilikinya serta berusaha mengembangkan potensi tersebut ke dalam tindakan praktis (Machendrawaty, 2001). Proses pemberdayaan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ini dapat dilakukan dengan merujuk pada konsep *capacity building*. Salah satu pelerapan konsep tersebut di masyarakat adalah gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK bertujuan untuk menunjang peningkatan kesehatan keluarga melalui program-program seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), pemberian makanan tambahan, dan kampanye kesehatan; peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan dan anak-anak melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal; serta peningkatan ekonomi keluarga dengan mendorong usaha kecil, koperasi, dan kegiatan produktif lainnya (Herlina, 2019).

Selain itu, gerakan PKK juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai budaya melalui partisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya, serta mendorong praktik keagamaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam keluarga dan masyarakat (Tim-Penggerak-PKK-Pusat, 2015). Implementasi akan hal ini dapat dilihat di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, dimana di daerah ini program PKK bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ada di pedesaan. Karena tujuan tersebut, maka tim PKK yang ada di Kelurahan Jawa umumnya adalah perempuan (ibu-ibu) yang telah dilatih dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

Peran tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa tersebut umumnya adalah memberikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat, berkolaborasi dalam pembentukan Posyandu, mempromosikan kerangka kesehatan, dan mengkoordinasikan kegiatan kesehatan lainnya. Selain itu, tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa juga menjalankan beberapa program lain seperti imunisasi anak balita, penerapan Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS), mendorong upaya terciptanya Keluarga Berencana (KB), serta melakukan sosialisasi pencegahan stunting. Pada pelaksanaan program tersebut, tentunya perlu melibatkan banyak masyarakat. Dalam konteks ini, tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa melakukan kolaborasi serta bekerja sama dengan penduduk yang ada di 8 Rukun Tetangga (RT) guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Meski telah memiliki tujuan, kerangka kerja, dan kolaborasi yang menurut hemat peneliti cukup, tapi di dalam penerapannya masih menimbulkan beberapa masalah. Masalah pertama yang terlihat adalah adanya masyarakat yang kurang mengerti terhadap penanganan lebih lanjut pada kesehatannya masing-masing mulai dari balita, remaja, dewasa dan lansia. Disamping itu, masalah lainnya muncul dari internal tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa, sebab masih ada anggota yang kurang aktif atau kurang antusias pada saat pelaksanaan program. Masalah ini tentu merupakan masalah yang serius, sebab berkaitan

dengan bidang kesehatan. Oleh karena, untuk menemukan rekomendasi dan mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi program, penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program dari tim PKK serta apa saja yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaan program dari tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Istilah kebijakan atau "*policy*" juga pada dasarnya dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Nur & Guntur, 2019). Selain itu, kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik yang berhubungan dengan masalah-masalah publik untuk memenuhi tujuan tertentu atau untuk mempengaruhi perilaku masyarakat (Birkland, 2019).

Implementasi Program

Implementasi program merupakan upaya yang diamanatkan untuk mencapai tujuan. Pada implementasi kebijakan, ada 3 pilar utama dalam implementasinya yaitu struktur organisasi, interpretasi pelaksana, dan metode kerja yang jelas (Suryana, 2009). Implementasi program memiliki beberapa cakupan, yakni:

1. *Tujuan dan sasaran*

Program ditetapkan untuk mencapai hasil tertentu atau menyelesaikan masalah tertentu. Tujuan ini menjadi panduan bagi semua aktivitas dalam program.

2. *Kegiatan*

Program melibatkan berbagai kegiatan atau proyek yang saling terkait dan dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini bisa meliputi penyuluhan, pelatihan, pengembangan produk, atau layanan.

3. *Sumberdaya*

Program memerlukan berbagai sumber daya, seperti dana, tenaga kerja, peralatan, dan teknologi, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

4. *Waktu dan jadwal*

Program biasanya memiliki jadwal waktu yang terencana dengan jelas, termasuk fase-fase pelaksanaan, tenggat waktu, dan milestone untuk memantau kemajuan.

5. *Manajemen dan koordinasi*

Program dikelola dan dikoordinasikan oleh tim atau manajer program yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dalam program tersebut.

6. *Evaluasi dan pemantauan*

Program melibatkan proses evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan telah tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pemantauan berkelanjutan membantu dalam mengawasi kemajuan dan hasil program (Budiman, 2017).

PKK

PKK adalah gerakan nasional yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga melalui pendidikan, peningkatan kesejahteraan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan. PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang dikelola oleh perempuan dan bertujuan untuk memperkuat peran serta keluarga dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan PKK mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya, yang semuanya diorientasikan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (Tim-Penggerak-PKK-Pusat, 2015). Tujuan PKK meliputi peningkatan kesehatan keluarga melalui program-program seperti posyandu, pemberian makanan tambahan, dan kampanye kesehatan; peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan dan anak-anak melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal; serta peningkatan ekonomi keluarga dengan mendorong usaha kecil, koperasi, dan kegiatan produktif lainnya (Herlina, 2019).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional pada kajian ini adalah pelaksanaan program PKK bidang kesehatan yaitu serangkaian tindakan terorganisir yang dilakukan oleh tim penggerak PKK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Program ini mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk mendorong perilaku hidup sehat, memberikan edukasi kesehatan, serta menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat. Pelaksanaan program PKK bidang kesehatan meliputi imunisasi anak dan balita, PHBS, KB, serta sosialisasi pencegahan stunting.

Metode Penelitian

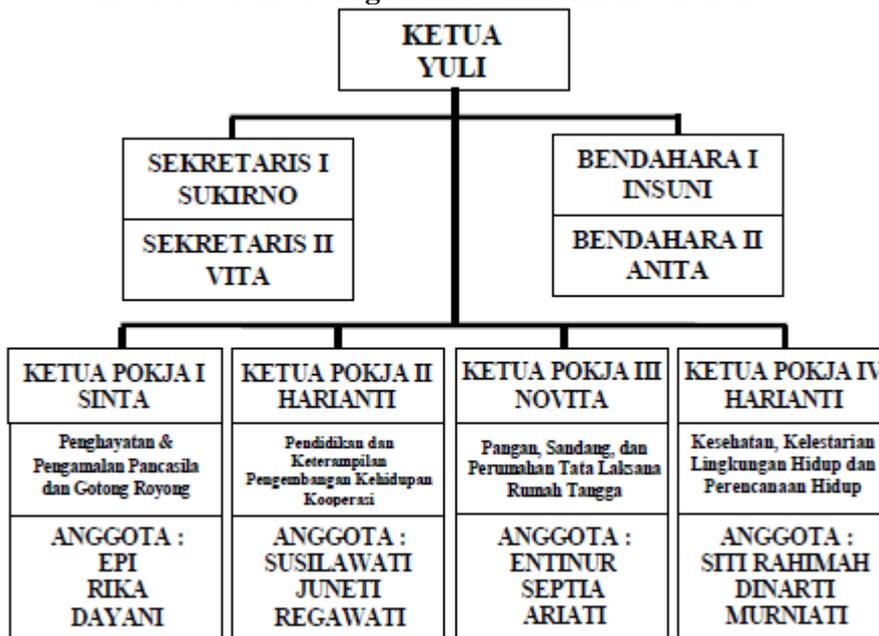
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program imunisasi anak dan balita, PHBS, KB, serta sosialisasi pencegahan stunting. Informan kunci meliputi Ketua Tim Penggerak PKK, sedangkan yang menjadi informan adalah anggota tim penggerak PKK Kelurahan Jawa, Kota Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan

secara kualitatif dengan 4 langkah yaitu pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tim PKK Kelurahan Jawa, Kota Samarinda memiliki visi "Terbentuknya keluarga yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku mulia, serta memiliki budi pekerti yang baik, sehat, dan sejahtera secara fisik maupun spiritual". Selain itu, tim PKK Kelurahan Jawa memiliki setidaknya beberapa misi utama, diantaranya meningkatkan pembentukan karakter keluarga melalui penghayatan, pengamalan pancasila, kegotong royongan serta kesetaraan dan keadilan gender melalui pemenuhan pangan, sandang dan perumahan sehat dan layak huni. Saat ini, Tim PKK Kelurahan Jawa dipimpin oleh 1 ketua dengan 2 sekretaris, 2 bendahara, 4 kelompok kerja, serta 11 orang anggota (gambar 1).

Gambar 1. Struktur Organisasi Tim PKK Kelurahan Jawa



Sumber: dokumentasi Pemerintah Kelurahan Jawa, 2023

Pelaksanaan Program Tim PKK Bidang Kesehatan di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda

Pelaksanaan program tim PKK bidang kesehatan Kelurahan Jawa, Kota Samarinda dikaji dari aspek-aspek: program imunisasi anak balita, program PHBS), program KB, sosialisasi pencegahan stunting, dan faktor penghambat pelaksanaan program dari tim PKK bidang kesehatan Kelurahan Jawa. Hasil

analisa dan pembahasan atas setiap aspek tersebut dapat dilihat pada uraian berikut.

1. *Imunisasi Anak dan Balita*

Imunisasi bayi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membuat bayi memiliki imun atau kekebalan terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan memasukkan vaksin ke tubuh bayi yang nantinya dapat merangsang sistem kekebalan tubuh agar kebal terhadap penyakit (Sriatmi, dkk., 2017). Dalam hal imunisasi balita, implementasi program dilakukan sejak balita berusia 0-12 bulan dengan memperhatikan secara berkala. Hal itu dilihat mulai dari imunisasi vaksin pertama hepatitis, BCG, imunisasi polio, dan jenis lain sebagainya. Program ini membuat masyarakat cukup terbantu, karena dengan ini masyarakat tahu bahwa imunisasi merupakan bagian dari pencegahan (preventif) dimana ini berdampak pada tumbuh kembang anak pada kekebalan tubuh yang memang harus dilakukan sejak dini. Temuan ini menunjukkan bahwa tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa mampu menjalankan program ini secara struktur.

Hal ini sejalan dengan definisi program yang diberikan oleh Ayuningtyas (2014), yaitu serangkaian kegiatan atau proyek terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah spesifik. Dalam konteks imunisasi balita, program ini bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh sejak dini, sehingga memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak dan mencegah berbagai penyakit menular. Implementasi program ini memerlukan perhatian dan pelaksanaan yang terstruktur, seperti yang ditunjukkan oleh temuan bahwa tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa mampu menjalankan program ini secara efektif. Dengan demikian, pernyataan pertama mencerminkan penerapan teori yang dijelaskan dalam pernyataan kedua, dimana kegiatan-kegiatan imunisasi terencana dan terorganisir berfungsi untuk mencapai tujuan kesehatan yang spesifik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Mansur (2021), yaitu serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengatasi masalah atau kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melalui tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa telah merancang dan melaksanakan program imunisasi sebagai bagian dari kebijakan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan pencegahan penyakit pada anak-anak. Implementasi yang terstruktur dan berkala dari program ini menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan kebijakan publik secara efektif, dengan dampak positif pada kesehatan masyarakat dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, pernyataan pertama menggambarkan penerapan kebijakan publik yang dijelaskan dalam pernyataan kedua, dengan program imunisasi sebagai contoh nyata dari keputusan strategis yang diambil untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat.

2. Program PHBS

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat (Indriastuti, 2021). Kegiatan PHBS dengan inisiasi PKK Kelurahan Jawa, Kota Samarinda dilakukan dengan cara menggiatkan cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Selain itu, dilakukan pula kegiatan pola makan yang sehat, dengan tujuan untuk menghindari makanan yang berlemak dan mengonsumsi hewani dan nabati yang tinggi serat serta mengurangi penggunaan yang berbahan minyak atau gorengan.

PHBS dilakukan juga dengan kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini dilakukan gotong royong oleh beberapa rt, masyarakat, tokoh agama, dan karang taruna. Membuang sampah bagian dari PHBS. Hal itu karena buang sampah pada tempatnya merupakan menjaga kebersihan dari lingkungan yang tentunya membuat nyaman, sehat, asri dan tangguh. Kegiatan lain yang dilakukan adalah senam sehat, dimana kegiatan ini bertujuan untuk merenggangkan otot-otot dari semua kegiatan aktivitas yang dilakukan ketika mulai bekerja ataupun kegiatan belajar anak.

Hal ini sejalan dengan tujuan PKK yang meliputi peningkatan kesehatan keluarga melalui berbagai program kesehatan seperti posyandu, pemberian makanan tambahan, dan kampanye kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Herlina (2019). Dampak positif yang tercatat dari kegiatan ini, seperti peningkatan derajat kesehatan, menunjukkan bahwa program PHBS yang dijalankan oleh tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa berhasil dalam mencapai tujuan kesehatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pernyataan pertama mencerminkan implementasi dari tujuan PKK yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga melalui program-program yang terencana dan terstruktur.

3. Program KB

KB merupakan bentuk usaha dalam mengatur jarak maupun angka kelahiran anak, dan usia yang ideal ketika melahirkan, mengatur waktu kehamilan melalui promosi, perlindungan serta bantuan yang sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Tim-Penggerak-PKK-Pusat, 2015). Program KB dilakukan dengan cara sosialisasi serta menciptakan kesepakatan dengan masyarakat untuk mengikuti program KB. Dampaknya baik, sebab cukup banyak yang mengikuti program KB. Selain itu, dampak lainnya adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk membatasi jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan.

Hal ini sesuai dengan definisi implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Anggara (2020), yang menyatakan bahwa implementasi adalah proses manajerial yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks ini, kegiatan sosialisasi dan penciptaan kesepakatan merupakan bagian dari perencanaan dan pengarahan, sementara peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat mencerminkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan KB. Dengan demikian, pernyataan pertama menggambarkan bagaimana proses manajerial implementasi kebijakan publik, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan kedua, diterapkan dalam praktik untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam program KB.

4. Sosialisasi Pencegahan Stunting

Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi (Tim-Penggerak-PKK-Pusat, 2015). Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan memengaruhi fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia (Rahmawati, 2017). Pada program ini, cara yang dilakukan oleh tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa adalah dengan melakukan kerja nyata, dimana hal ini dibuktikan dengan membuat bubur labu siam atau tomat. Dampaknya cukup baik, sebab ibu dari balita menjadi memiliki pengetahuan gizi, disamping dapat memenuhi gizi seimbang pada balita tersebut.

Program sosialisasi pencegahan stunting dapat dikategorikan dalam kebijakan distributif atau regulatif, karena ia bertujuan untuk mendistribusikan informasi dan praktik gizi yang tepat kepada masyarakat, serta menetapkan regulasi dalam bentuk edukasi praktis untuk mencegah masalah gizi pada balita (Anderson, 2018). Selain itu, dengan adanya dampak tersebut, maka sejalan dengan pernyataan Ayuningtyas (2014), sebab program sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya mampu mencapai tujuan tertentu atau menyelesaikan masalah spesifik.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Tim PKK Bidang Kesehatan di Kelurahan Jawa Kota Samarinda

Faktor penghambat utama dalam implementasi program PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa Kota Samarinda adalah faktor internal. Faktor ini terlihat dari kurangnya antusias pengurus serta masih belum meratanya pemahaman mengenai kesehatan. Kurangnya antusiasme pengurus dan pemahaman yang belum merata mengenai kesehatan pada pelaksanaan program tim PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, dapat berdampak negatif pada efektivitas dan hasil program kesehatan tersebut. Beberapa dampak yang mungkin muncul dari masalah ini adalah penurunan kualitas program. Sebab, tanpa antusiasme yang cukup dari pengurus, program kesehatan mungkin tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen atau tidak mencapai standar yang diharapkan.

Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan di kalangan pengurus dapat menyebabkan penyampaian informasi yang kurang akurat atau tidak memadai kepada masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas edukasi kesehatan

dan pencegahan penyakit yang disediakan oleh program. Selain itu, jika program kesehatan tidak berjalan dengan efektif karena masalah ini, dampaknya bisa berupa meningkatnya masalah kesehatan di masyarakat, seperti peningkatan angka penyakit atau masalah kesehatan yang dapat dicegah.

Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan program tim penggerak PKK bidang kesehatan di Kelurahan Jawa, Kota Samarinda, telah berjalan dengan baik. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain imunisasi anak balita yang melibatkan penyuluhan imunisasi untuk anak usia 0-12 bulan, termasuk hepatitis B, BCG, dan polio. Program PHBS juga aktif dilakukan, dengan mengajak masyarakat mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, mengonsumsi makanan sehat, dan berolahraga. Selain itu, program KB telah membantu masyarakat dalam memilih alat kontrasepsi sesuai kesepakatan keluarga. Sosialisasi pencegahan stunting bahkan telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya asupan gizi, imunisasi, dan pemantauan gizi secara berkala. 2) Faktor penghambat utama adalah dari internal sendiri yaitu minimnya antusiasme dari pengurus yang terlihat dari kurangnya rasa disiplin dalam menjalankan program kesehatan yang telah dirancang serta masih belum meratanya pemahaman mengenai kesehatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Melibatkan pihak swasta untuk berkontribusi dalam setiap program PKK, sehingga pelaksanaan dapat berjalan lebih maksimal.
2. Melakukan bimbingan dan monitoring secara bertahap pada para pengurus PKK agar ada peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2018). *Public Policymaking*. New York: Holt.
- Anggara, S. (2020). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. New York: Routledge.
- Budiman, S. (2017). Analisis Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan UU No. 14 Tahun 2008. *JIKH*, 11(2), 110-118.
- Herlina, H. (2019). Fungsi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Maasawah

- Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, 5(2), 201-212.
- Indriastuti, D. R. (2021). *Membangun Kepedulian Masyarakat Untuk Berperilaku Pola Hidup Bersih Sehat*. Solo: Percetakan Kurnia.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *Jurnal UINSU*, VI(2), 1-10.
- Muadi, S., & Ismail, M. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 196-224. doi:<http://dx.doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sriatmi, A., Martini, Patriajati, S., Dewanti, N. A., Budiyan, R. T., & Nandini, N. (2017). *Mengenal Imunisasi Rutin Lengkap*. Semarang: LPPM - Universitas Diponegoro.
- Suryana. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim-Penggerak-PKK-Pusat. (2015). *Buku Pedoman Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Tim Penggerak PKK Pusat.